

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah, pengeluaran pemerintah daerah, dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil analisis data panel menggunakan model regresi, diperoleh beberapa kesimpulan penting yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, meskipun peningkatan KKD memiliki kecenderungan menurunkan angka kemiskinan, namun pengaruh itu tidak terbukti kuat secara statistik. Kondisi tersebut membuktikan sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menjadi instrumen yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah, rendahnya basis pajak dan retribusi, serta belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, peran kemandirian keuangan daerah masih relatif kecil dalam mendukung kebijakan pengurangan kemiskinan di Sumatera Barat.
2. Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) mempengaruhi tingkat kemiskinan secara positif signifikan. Hasil tersebut membuktikan bahwa setiap peningkatan belanja daerah, khususnya pada sektor yang produktif, berkontribusi nyata dalam menekan angka kemiskinan. Pemerintah daerah yang mampu mengalokasikan anggaran secara tepat, misalnya pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, dapat menciptakan dampak yang langsung dirasakan oleh kelompok miskin. Dengan kata lain, belanja daerah memiliki fungsi strategis dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan mempercepat proses pengentasan kemiskinan.
3. Belanja Modal (BM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan fungsi belanja modal di Sumatera Barat

masih minim dan tidak langsung dirasakan untuk mengentaskan kemiskinan. Anggaran belanja modal di Provinsi Sumatera Barat yang masih minim diakibatkan besarnya alokasi belanja pemerintah untuk hal lain seperti untuk kepegawaian, pendidikan, dan kesehatan. Belanja modal mencerminkan sedikit banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. PAD adalah sumber penghasilan daerah yang bersumber dari potensi daerah masing-masing yang memerlukan peningkatan untuk pembiayaan pengeluaran daerah, terkhusus belanja modal. Adanya peningkatan PAD setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat membuat pengalokasian dana belanja modal juga meningkat.

4. Hasil pengujian koefisien determinasi R^2 yaitu 0.4211 menandakan sekitar 42.11% variasi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Sumatera Barat dapat dijelaskan oleh ketiga variabel penelitian, yaitu kemandirian keuangan daerah (KKD), pengeluaran pemerintah daerah (PPD), serta belanja modal (BM). Kemudian 57.89% sisanya mendapatkan pengaruh dari faktor lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model, seperti tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, inflasi, investasi, serta faktor sosial-ekonomi lainnya. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh banyak variabel selain faktor fiskal.

Secara umum, penelitian ini membuktikan bahwa instrumen fiskal daerah di Sumatera Barat mempunyai peran berbeda dan kompleks dalam menanggulangi kemiskinan. Poin utama yang dibuktikan adalah bahwa Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) merupakan faktor kunci yang paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Sebaliknya, Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) belum cukup kuat untuk memberikan dampak nyata karena keterbatasan kapasitas fiskal, sementara Belanja Modal (BM) justru menunjukkan pengaruh positif yang membuktikan bahwa alokasi anggaran fisik di Sumatera Barat saat ini belum tepat sasaran atau masih terlalu minim untuk menyentuh kebutuhan langsung penduduk miskin. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal saja hanya mampu menjelaskan 42,11% dinamika kemiskinan, sehingga pembuktian

ini memperkuat teori bahwa kemiskinan adalah fenomena multidimensional yang juga sangat bergantung pada faktor non-fiskal lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti mengajukan sejumlah saran yang ditujukan kepada banyak pihak terkait, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun akademisi/peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

- **Reorientasi dan Evaluasi Belanja Modal:** Mengingat hasil temuan membuktikan belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan, pemerintah daerah perlu mengevaluasi efektivitas alokasi belanja modal. Disarankan agar belanja modal bukan sekadar fokus kepada pembangunan fisik administratif (misalnya gedung kantor), namun lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang memiliki multiplier effect bagi masyarakat miskin, seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, dan sarana pasar tradisional.
- **Mempertahankan Kualitas Pengeluaran Pemerintah (PPD):** Karena PPD terbukti signifikan menurunkan kemiskinan, pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan belanja pada sektor pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta program perlindungan sosial. Penyaluran anggaran ini harus dipastikan tepat sasaran agar efektifitasnya dalam menekan angka kemiskinan tetap terjaga.
- **Penguatan Basis Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Pemerintah daerah perlu lebih inovatif dalam menggali potensi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah tanpa membebani sektor UMKM. Hal ini penting agar kemandirian keuangan daerah meningkat, sehingga daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk mendanai program penanggulangan kemiskinan secara mandiri.

2. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

- Sinkronisasi Kebijakan Fiskal: Pemerintah Provinsi disarankan untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam hal sinkronisasi program pembangunan. Hal ini bertujuan agar pembangunan infrastruktur (Belanja Modal) yang dilakukan di daerah selaras dengan upaya pengentasan kemiskinan di tingkat provinsi, sehingga alokasi anggaran tidak terkesan minim dampak
- Pemberian Stimulus dan Insentif Berbasis Kinerja: Pemerintah Provinsi dapat merumuskan kebijakan bantuan keuangan atau insentif bagi Kabupaten/Kota yang berhasil meningkatkan kemandirian fiskalnya sekaligus menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Hal ini penting untuk mendorong persaingan positif antar daerah dalam mengelola PAD agar lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mengejar target penerimaan daerah semata.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Penambahan Variabel Multidimensional: Karena nilai koefisien determinasi menunjukkan masih adanya faktor lain di luar model, peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel non-fiskal seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau tingkat inflasi daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih luas.
- Metode Penelitian Kualitatif: Peneliti selanjutnya dapat melengkapi penelitian ini dengan metode kualitatif atau studi kasus pada kabupaten/kota tertentu yang memiliki anomali tinggi (misal: PAD tinggi namun kemiskinan juga tinggi) untuk mengetahui kendala teknis di lapangan.

5.3 Implikasi Kebijakan

Dari hasil analisis data serta kesimpulan yang sudah diuraikan, temuan ini menghasilkan berbagai implikasi kebijakan yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Memperbaiki Arah Pembangunan Fisik (Belanja Modal). Hasil studi membuktikan bahwa pembangunan fisik atau belanja modal saat ini belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Hal ini memberikan pelajaran bagi pemerintah bahwa pembangunan tidak boleh hanya fokus pada pembangunan gedung kantor atau proyek besar di perkotaan saja. Kebijakan ke depan harus lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kehidupan rakyat kecil, seperti perbaikan jalan-jalan di desa, irigasi sawah, dan fasilitas pasar agar ekonomi warga miskin bisa bergerak.
2. Mempertahankan Belanja pada Sektor Pelayanan Publik. Pengeluaran pemerintah terbukti mampu menurunkan kemiskinan, maka kebijakan untuk mengalokasikan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial harus terus dipertahankan. Pemerintah perlu menjamin bahwa setiap dana yang dikeluarkan benar-benar sampai ke tangan yang tepat dan tepat sasaran, sehingga beban pengeluaran warga miskin dapat berkurang.
3. Mencari Cara Baru Meningkatkan PAD. Saat ini, kemandirian keuangan daerah belum memberikan dampak besar bagi pengurangan kemiskinan. Hal ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan daerah tanpa harus memberatkan masyarakat kecil atau pelaku UMKM. Jika pendapatan daerah meningkat secara mandiri, pemerintah akan memiliki lebih banyak modal untuk membiayai program-program kesejahteraan tanpa harus selalu bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat.
4. Kerjasama Lintas Dinas dan Sektor. Penelitian ini membuktikan bahwa masalah kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dari sisi keuangan saja, karena masih banyak faktor lain yang mempengaruhi (seperti pendidikan

dan lapangan kerja). Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih erat antar dinas (seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum) agar program penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara bersamaan dan bukan berjalan sendiri.

